

Volume 2 Nomor 2 November 2021

# MENSUKSESKAN MITIGASI BENCANA COVID-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

Fajar Apriani<sup>1</sup>, Arbainah Saidi<sup>2</sup>, Ady Darmawan<sup>3</sup>, Ramadhan Aunur Rahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia. E-mail <u>fajaryani.fisip@gmail.com</u>

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Indonesia.

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

History: submitted Okt 20, 2021; revised Okt 26, 2021; accepted Okt 30, 2021

#### **ABSTRACT**

Local governments play an important role in disaster response, namely before, during and after the disaster. However, society has an attitude towards policies, which are formed the basis of the existence of trust values to further lead to self-acceptance of the policies carried out by the government. This study focuses on examining the important value of public trust in government policies in overcoming the Covid-19 pandemic in Samarinda City. This research is descriptive analythical using a mixed approach. Quantitative data collected through survey method, while qualitative data were collected from observation, documentation and literature study techniques. The population in this study were all residents of Samarinda City with a sample size of 193 respondents. Data were collected for two weeks using an online questionnaire that had been tested for reliability. Research result shows that the people of Samarinda City have good trust in government in mitigating the Covid-19 disaster as outlined in the health protocol implementation policy, Covid-19 vaccination and trust the seriousness of the government's actions for the public. Public trust in various government actions in mitigating the Covid-19 disaster is one of the things that can affect the success of joint disaster management.

Keyword: Disaster Mitigation; public trust; pandemic Covid-19.

#### **ABSTRAK**

Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam ketanggapan bencana, yakni sebelum, pada saat hingga setelah terjadinya bencana. Namun masyarakat memiliki sikap terhadap kebijakan, yang terbentuk secara mendasar dari adanya nilai-nilai kepercayaan untuk selanjutnya memunculkan penerimaan diri terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Penelitian ini berfokus meneliti nilai penting dari kepercayaan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Samarinda. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif yang menggunakan pendekatan campuran. Data kuantitatif dikumpulkan melalui metode survei, sedangkan data kualitatif dikumpulkan dari teknik observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kota Samarinda dengan ukuran sampel sebanyak 193 orang. Data dikumpulkan selama dua minggu menggunakan kuesioner daring yang telah diuji reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda memiliki kepercayaan yang baik terhadap pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana Covid-19 yang dituangkan dalam kebijakan penerapan protokol kesehatan, vaksinasi Covid-19 dan mempercayai kesungguhan tindakan pemerintah untuk publik. Kepercayaan publik terhadap beraneka tindakan pemerintah dalam mitigasi bencana Covid-19 merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penanganan bencana secara bersama.

Kata Kunci: Mitigasi bencana; kepercayaan masyarakat; pandemi Covid-19.

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

### **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana non alam, yang menjadi kasus krisis secara bersamaan. Manajemen bencana dikatakan Bly dkk (2020) meliputi empat pilar manajemen kedaruratan: perencanaan dan persiapan, mitigasi, respon, dan pemulihan. Situasi darurat merupakan kondisi penting dalam penanganan kesehatan, kehidupan dan tempat tinggal yang dapat dikelola dengan kapabilitas organisasi-organisasi yang terkait.

Dikatakan lebih lanjut oleh Bly dkk (2020) bahwa bencana di sisi lain, merupakan situasi darurat yang sangat kompleks, yang membutuhkan banyak sumberdaya yang tidak dapat tersedia dengan segera. Maka manajemen bencana mengacu pada sejumlah prinsip dari manajamen kedaruratan dan menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi dan kerjasama tim. Terbatasnya sumberdaya akan memberikan tantangan bagi pemerintah dan organisasi-organisasi secara sekaligus pada efek dari bencana, juga pada kemampuan untuk mengatasinya.

Berdasarkan laporan yang disajikan oleh negara-negara anggota *Asian Disaster Reduction Center (ADRC)*, terdapat tiga praktek tanggap bencana yang berkembang selama pandemi Covid-19, antara lain: (1) Digitalisasi beberapa aspek tanggap bencana termasuk peringatan dini, pengawasan dan penilaian dampak, (2) Evakuasi yang tersebar untuk menegakkan jarak sosial, termasuk tindakan lain seperti pengujian, pelacakan dan isolasi individu yang terinfeksi, dan (3) Pertolongan pertama psikologis jarak jauh kepada individu yang terkena dampak bencana yang sudah mengalami kecemasan akibat pandemi (Potutan dan Arakida, 2021). Artikel ini berupaya mengkaji kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam menegakkan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, ketika banyak negara lain yang telah menerapkan praktek-praktek tanggap bencana yang terintegrasi dalam langkah-langkah baru dan terlatih.

Hasil penelitian ini diyakini dapat menghasilkan deskripsi atas ketanggapan masyarakat Kota Samarinda terhadap bencana Covid-19 sebagai salah satu obyek studi kasus yang terjadi di negara berkembang, sebagaimana dinyatakan oleh Quarantelli (dalam Bly, 2020) bahwa negara-negara sedang berkembang merupakan subyek yang dapat berulang-ulang mengalami dampak bencana berupa berkurangnya atau terhambatnya pembangunan. Kerentanan negara berkembang dalam menghadapi bencana alam maupun non alam, menjadi salah satu latar belakang mengapa penting untuk mengkaji kepercayaan masyarakat di negara berkembang terhadap pemerintah dalam menghadapi bencana secara bersama-sama, terutama di daerah.

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam ketanggapan bencana, yakni sebelum, pada saat hingga setelah terjadinya bencana (Kusumasari dkk, 2012) maka penelitian ini berupaya

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

mengkaji masyarakat sebagai sasaran kebijakan, yang memiliki sikap terhadap kebijakan, yang terbentuk secara mendasar dari adanya nilai-nilai kepercayaan untuk selanjutnya memunculkan penerimaan diri terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Penelitian ini berfokus meneliti nilai penting dari kepercayaan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Samarinda. Sebagaimana dikemukakan oleh teori Schade dan Schlag (2001) bahwa penerimaan publik yang bersifat mendukung kebijakan pemerintah hanya dapat diharapkan apabila seseorang dan/atau publik memiliki kepercayaan terhadap efektivitas dari penggunaan suatu sistem. Artinya, bahwa kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting untuk pencapaian keberhasilan kebijakan itu akibat adanya dukungan dari publik.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana kepercayaan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda?

## KERANGKA TEORI

Studi mengenai manajemen bencana di negara-negara berkembang umumnya berfokus pada isu kerentanan sosial maupun pada pentingnya partisipasi masyarakat (Ndunce dan Lecn, dalam Kusumasari, 2008) sehingga diperlukan sebuah pendekatan terpadu untuk mengelola penanggulangan bencana secara efektif (Moe dan Pathranarakul, 2006).

Penanganan bencana tentu merupakan hal yang tidak mudah mengingat bencana terjadi dalam situasi darurat yang sangat rumit namun perlu untuk segera diatasi demi kebutuhan banyak pihak yang terdampak.

Menurut studi literatur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat lima model manajemen bencana, yaitu:

- 1. Disaster management continuum model. Tahap-tahap manajemen bencana dalam model ini meliputi kedaruratan, kelegaan (relief), rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Model ini dikatakan merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga mudah untuk diimplementasikan.
- 2. *Pre-during-post disaster model.* Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.
- 3. Contract-expand model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (kedaruratan, kelegaan (relief), rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tertentu lebih dikembangkan (kedaruratan dan kelegaan), sementara tahap yang lain seperti rehabilitasi, rekonstruksi dan mitigasi kurang ditekankan.

- 4. *The crunch and release model.* Model manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan, maka bencana juga akan kecil kemungkinannya terjadi. Meski bahaya tetap terjadi.
- 5. *Disaster risk reduction framework.* Model manajemen bencana ini menekankan upaya manajemen pada identifikasi resiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun bahaya dan mengedepankan kapasitas untuk mengurangi resiko tersebut.
- 6. Disaster management cycle. Model manajemen bencana ini terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana (pre event) dan yang kedua adalah setelah terjadinya bencana (post event). Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mitigasi bencana (mengurangi dampak bencana). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa tanggap bencana ataupun pemulihan bencana (Baskoro, 2021).

Kompleksitas dari sebuah bencana membuat tantangan manajemen dalam berbagai hal. Bahkan suatu rencana terbaik tidak akan dapat digunakan untuk mengatasi setiap kesulitan yang ditemukan dalam suatu bencana (Quarantelli dalam Bly dkk, 2020). Sumberdaya didefinisikan sebagai anggaran organisasi yang fundamental, kondisi fisik organisasi, individu dan atribut-atribut sumberdaya organisasi (Hill, 2001). Dalam lingkungan yang sumberdayanya terbatas, tantangannya sangat besar. Pada umumnya, lingkungan sering terkena dampak dari terbatasnya sumberdaya akibat status sosial ekonomi yang juga rendah. Kemiskinan dan bencana sangat kuat hubungannya (Coppola, 2015).

Kemampuan untuk beradaptasi merupakan pusat dari kemampuan organisasi untuk melawan dari bencana (Hufschmidt dalam Bly dkk, 2020). Ketangguhan dibangun pada semua aspek dari manajemen bencana – mulai dari persiapan hingga pengendalian, respon dan pemulihan (Etkin, 2014; Murphy dkk, 2011).

Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat yang mempengaruhi kepercayaannya terhadap pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana. Terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikatakan oleh Nugroho (2018) menjadi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam hal kebijakan mitigasi bencana Covid-19.

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini mengidentifikasi kepercayaan masyarakat Kota Samarinda terhadap Pemerintah Kota dalam melakukan mitigasi bencana Covid-19. Lokasi penelitian adalah Kota Samarinda yang terdiri dari sepuluh kecamatan. Sehingga populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kota Samarinda yang tersebar di sepuluh kecamatan tersebut yang pada tahun 2020 berjumlah 827.994 jiwa. Sampel kemudian diambil secara acak berdasarkan kesediaan masyarakat Kota Samarinda untuk menjadi responden penelitian pada saat kuesioner dibagikan secara daring melalui penggunaan google form dengan jumlah 193 orang. Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu di bulan Desember 2020. Sebagai instrumen dalam penelitian ini, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya dan hasil uji Cronbach's Alpha adalah sebesar 0,803 yang diujikan pada 10 sampel.

Sumber bukti bagi pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan tertutup mengenai indikator kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Status masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini meliputi laki-laki/perempuan, yang sudah menikah, tidak/belum menikah, bercerai, bekerja di berbagai sektor, formal maupun informal, dengan berbagai jenjang pendidikan dan usia berkisar antara 17 hingga 64 tahun. Data hasil survei dari jawaban seluruh responden diolah dan dianalisis dengan mempergunakan rumus distribusi frekuensi kemudian disajikan dalam bentuk grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Substansi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda untuk Mitigasi Bencana Covid-19

Kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang diberlakukan pemerintah dilakukan secara masif dan semakin menyentuh banyak pembatasan pada kegiatan masyarakat. Diantaranya menyangkut larangan atau pembatasan dalam kegiatan belajar-mengajar, kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan wisata dan hiburan, penggunaan transportasi umum dan pribadi bahkan resepsi pernikahan.

Kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang dirumuskan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda tertuang di dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020. Peraturan Walikota tersebut merupakan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan umum yang menaunginya, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Terkait dengan tiga komponen dasar dalam kebijakan publik, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 tersebut memiliki tiga unsur pokok:

1) Tujuan yang hendak dicapai adalah agar tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan (yang disebut 4M – Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dapat terlaksana

- guna pencegahan dan pengendalian Covid-19. Masyarakat didesak untuk menjalankan protokol kesehatan dalam perilaku sehari-harinya.
- 2) Sasaran yang spesifik disebutkan dalam subyek pengaturan Peraturan Walikota tersebut yaitu perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Masyarakat maupun pengelola usaha wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan menggunakan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 yang wajib disiapkan oleh setiap pengelola usaha.
- 3) Cara mencapai sasaran adalah dengan memastikan setiap subyek pengaturan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan oleh perangkat daerah, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh subyek pengaturan akan diberikan sanksi sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Walikota tersebut, mulai dari sanksi sosial hingga pemberlakuan denda yang akan disetor sebagai kas daerah. Pengaturan mengenai sanksi dimaksudkan sebagai efek jera bagi pelanggar kebijakan.

Untuk wilayah Kota Samarinda, sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 rincian para pelaksana dan *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain:

- 1. Untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda.
- 2. Untuk sosialisasi dilakukan oleh beberapa perangkat daerah yakni Dinas Kesehatan Kota, Dinas Komunikasi dan Informasi melalui sarana media informasi yang ada kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur/organisasi masyarakat lainnya.
- 3. Untuk penegakan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didampingi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Penerapan disiplin dan penegakan hukum untuk implementasi mitigasi bencana Covid-19 di Kota Samarinda dilakukan melalui aksi razia oleh tim gabungan yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan unsur terkait lainnya, menghasilkan temuan bahwa setengah bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 terdapat 283 orang pelanggar (<a href="https://kaltim.prokal.co">https://kaltim.prokal.co</a>). Pelanggar ini didominasi oleh masyarakat pengguna jalan dan pedagang pasar tradisional yang mengemukakan telah mengetahui peraturan tersebut tetapi tidak mematuhinya dengan alasan lokasi kegiatan yang hendak dituju berjarak dekat dari tempat tinggalnya. Ditemukan pula berdasarkan subyek pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum pada kawasan Citra Niaga dan Tepian Mahakam, terjadi pelanggaran serius terhadap penegakan

Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

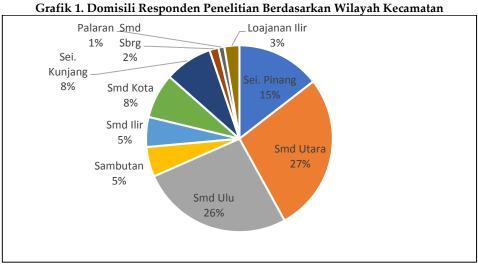
disiplin protokol kesehatan, baik penggunaan masker maupun perilaku menjaga jarak oleh para pengunjung. Ditambah lagi tidak ada upaya para pengelola usaha di kawasan tersebut untuk menertibkan para pengunjungnya.

Bahkan pada Oktober 2020 Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan penutupan kawasan Citra Niaga, Tepian Mahakam, Tempat Hiburan Malam dan karaoke sebagai langkah perbaikan sistem protokol kesehatan di beberapa kawasan yang sudah kerapkali menjadi titik-titik sentral pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Disamping sebelumnya, para pengelola usaha di kawasan tersebut maupun pengunjungnya telah diberi himbauan beberapa kali namun tetap didapati melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang tertuang di dalam kebijakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020.

Berikutnya, pada akhir September 2020 dilaporkan bahwa dari 10 kecamatan yang terdapat di Kota Samarinda terjadi 1.790 pelanggaran dengan bentuk pelanggaran protokol kesehatan pada umumnya tidak menggunakan masker di tempat umum. Peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan kemudian mengalami peningkatan pada bulan berikutnya mencapai 2000 lebih kasus, dengan temuan bahwa pelaku pelanggaran sudah pernah terjaring razia penegakan disiplin protokol kesehatan sebanyak dua bahkan tiga kali (Riduan, 2020).

## Deskripsi Masyarakat Kota Samarinda sebagai Responden Penelitian

193 orang responden penelitian ini merupakan masyarakat Kota Samarinda yang berdomisili di sepuluh wilayah kecamatan (grafik 1).



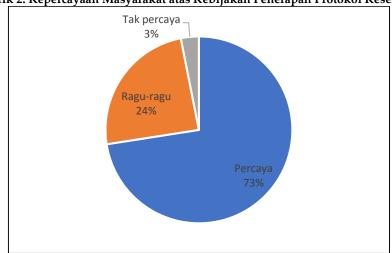
Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

# Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kota Samarinda dalam Mitigasi Bencana Covid-19

Dikemukakan oleh Schade dan Schlag (2001) bahwa penerimaan publik hanya dapat diharapkan jika seseorang memiliki kepercayaan terhadap efektivitas dari Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

penggunaan suatu sistem. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun jawaban responden mengenai rasa percaya mereka pada kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan mitigasi bencana Covid-19.

Berdasarkan hasil survei yang terkumpul, masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa penyebaran Covid-19 dapat dicegah melalui kebijakan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan (grafik 2). 140 orang responden dari 193 orang mempercayai bahwa kebijakan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan Pemerintah Kota Samarinda merupakan bentuk mitigasi bencana Covid-19 yang efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.



Grafik 2. Kepercayaan Masyarakat atas Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan

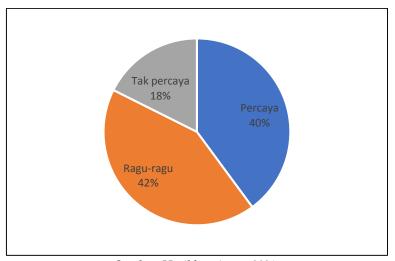
Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Penerapan protokol Covid-19 dikenal dengan sebutan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hingga menuju dua tahun pandemi Covid-19 melanda, masyarakat Kota Samarinda masih mempercayai bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan mereka melindungi diri mereka sendiri, keluarga dan oranglain. Maka hal ini merupakan temuan yang menunjukkan nilai positif dari perilaku masyarakat yang dilandasi dari kepercayaan yang baik terhadap mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah.

Namun, berdasarkan hasil survei yang terkumpul, diketahui pula bahwa masyarakat Kota Samarinda cukup mempercayai dan/atau ragu-ragu meyakini bahwa penyebaran Covid-19 dapat dicegah melalui kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi Covid-19 (grafik 3).

Grafik 3. Kepercayaan Masyarakat atas Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda



Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 yang mengandung polemik di masyarakat bahkan hingga kini, sebagai salah satu upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 berdasarkan data yang terkumpul melalui survei yang telah dilakukan masih diragukan oleh masyarakat Kota Samarinda akan mampu mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda. 82 orang responden dari 193 orang menyatakan cukup percaya atau ragu-ragu bahwa vaksinasi mampu menjadi upaya mitigasi bencana Covid-19 yang tepat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andre Rahadian, Ketua Satgas Nasional bahwa *immunity* tidak akan tercapai ketika *variety* Covid berkembang terus. Sehingga dibutuhkan penanganan yang bersifat holistik. Selama pandemi berlangsung, pemerintah baik pada level nasional maupun level daerah telah berupaya meyakinkan publik atas vaksinasi dengan melibatkan pakar kesehatan, tokoh agama bahkan *public figure*. Bahkan melalui intervensi yang terutama dikaitkan dengan aktivitas perjalanan ke luar daerah yang akan dilakukan oleh masyarakat, sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk mau divaksinasi menjadi modal untuk mencegah perkembangan kasus Covid-19 di masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang terkumpul, diketahui data lainnya bahwa masyarakat Kota Samarinda mempercayai bahwa Pemerintah Kota Samarinda sungguh-sungguh melakukan mitigasi bencana Covid-19 (grafik 4).

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda



Sumber: Hasil kuesioner, 2021.

Data yang terkumpul dari survei menunjukkan bahwa 91 orang responden meyakini bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah bersungguh-sungguh melakukan upaya mitigasi bencana Covid-19 selama ini. Mulai dari upaya penyediaan berbagai fasilitas kesehatan maupun saluran-saluran komunikasi untuk penanganan pasien Covid-19 selama masa pandemi hingga upaya penertiban aktivitas masyarakat.

Walaupun jika berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penerapan kebijakan mitigasi bencana Covid-19 melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 ditemukan realita bahwa masih kurangnya kesadaran diri dan pemahaman masyarakat Kota Samarinda terhadap bahaya Covid-19 dikarenakan manusia tak pernah berhenti beraktivitas dan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Terlebih lagi dengan pemberlakuan kebijakan tambahan yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Samarinda tentang Pemberlakuan Jam Malam memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha yang berpengaruh pada berkurangnya pendapatan mereka. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dalam menegakkan sanksi bagi para pelanggar kebijakan tersebut juga memberikan sumbangsih pada belum efektifnya kebijakan Pemerintah Kota untuk mitigasi bencana Covid-19.

Pertama, adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak menghiraukan perintah *physical* atau *social distancing*. Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Samarinda, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga PSBB dan PPKM Darurat telah diberlakukan. Kedua, adanya perilaku menyangkal, memberontak, impulsif, merasa kebal atau berpikir bahwa Covid-19 adalah alat politik sesuai dengan beberapa hasil penelitian (Iptidaiyah dkk, 2020).

Namun demikian, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kalimantan Timur pada Agustus 2021 berhasil mengalami penurunan (Kartono, 2021 dalam

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

https://kaltim.tribunnews.com). Berdasarkan data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda (2021), persentase penurunan kasus di Kalimantan Timur tercatat sudah mencapai 19,82 persen. Khusus untuk Kota Samarinda, dilaporkan penurunan kasus Covid-19 sejalan dengan penurunan tingkat kematian. Kasus kesembuhan pun terus meningkat dan infeksi terluar juga mulai terus mengalami penurunan.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan mitigasi bencana Covid-19 merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi diperolehnya dukungan publik pada keberhasilan penanganan bencana secara bersama. Hal ini sejalan dengan teori Schade dan Schlag (2001) bahwa penerimaan publik yang bersifat mendukung kebijakan pemerintah hanya dapat diharapkan apabila seseorang dan/atau publik memiliki kepercayaan terhadap efektivitas dari penggunaan suatu sistem. Yang dalam hal ini adalah sistem manajemen bencana yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sedemikian rupa dalam penanganan masalah kebencanaan yang melanda publik. Dengan demikian, kepercayaan publik pada kesungguhan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya mitigasi bencana merupakan hal yang penting.

Pada saat berhadapan dengan bencana, pendekatan "seluruh bahaya" dipekerjakan sebagai basis dari persiapan untuk krisis alam apapun. Semakin maju persiapan itu akan disesuaikan pada bahaya-bahaya yang spesifik (McCann, 2013; De Smet, dkk dalam Bly dkk, 2020). Kita tidak dapat merencanakan berbagai kemungkinan, terutama tidak setiap kejadian ekstrim dan yang jarang terjadi tercakup di dalamnya. Perencanaan harus cukup luas untuk membiarkan adaptasi seperlunya (Brandrud, dkk 2017). Jika perencanaan terlalu nyaris berfokus pada persiapan, mungkin menjadi tidak efektif. Fleksibilitas adalah kuncinya.

Persiapan menghadapi bencana juga berkenaan dengan membangun jaringan. Lagi-lagi kembali pada definisi dari bencana yang memerlukan bantuan dari luar dengan segera – yang mempengaruhi organisasi. Koordinasi dan komunikasi antar agensi adalah penting dalam keberhasilan atau kekurangan tanggap bencana (Timbie, dkk 2013; Kollek, 2013; Hu Q, dkk 2014). Menjalin dan meningkatkan hubungan antar organisasi tidak dapat dilakukan pada saat diperlukan. Hal ini perlu menjadi prioritas utama bagi organisasi saat ini dalam keterhubungan global. Apakah untuk sebuah rumah sakit, sebuah negara, atau sebuah keluarga tunggal, Alexander (2020) maupun Health Standards Organization (2020) menyatakan bahwa untuk sekarang dan nanti manajer kedaruratan mengaplikasikan "Tidak ada yang dapat menggantikan hubungan personal" (Alexander, 2020) sebagai penanganan yang paling mendasar yang berasal dari dalam diri setiap individu dalam mengadaptasikan dirinya untuk survive dalam menghadapi bencana.

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

### **KESIMPULAN**

Manajemen bencana menghadapi tantangan dari kesulitan yang kita miliki sebagai orang dan organisasi untuk memikirkan masa depan, terkait dengan keadaannya sebagai suatu peristiwa yang tidak pasti. Kompleksitas dan kerusakan dari bencana lebih jauh melengkapi tugas-tugas perencanaan, persiapan dan ketanggapan yang harus dilakukan pemerintah. Semakin rumit peristiwanya, maka semakin suatu organisasi harus beradaptasi dan berkolaborasi dengan organisasi lainnya. Kerangka manajemen sumberdaya dalam bencana akan memandu organisasi dalam aktivitas persiapan menghadapi bencana.

Namun, kepercayaan publik terhadap beraneka tindakan pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan mitigasi bencana Covid-19 merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi diperolehnya dukungan publik pada keberhasilan penanganan bencana secara bersama. Kepercayaan publik pada kesungguhan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya mitigasi bencana merupakan hal yang penting, sebab tanpa partisipasi publik (termasuk pemberian kepercayaan kepada pemerintah), maka kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah tidak akan mampu mencapai tujuan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Arya. (2021). *Menjaga Ketahanan Negara terhadap Bencana Melalui Disaster Risk Management*. Center for Risk Management & Sustainability/CRMS. Diakses dari <a href="https://crmsindonesia.org/publications">https://crmsindonesia.org/publications</a> pada 26 Agustus 2021.
- Bly, Jared, Louis Hugo Francescutti and Danielle Weiss. (2020). *Disaster Management: A State of the Art Review*. Diakses dari <a href="https://www.intechopen.com/chapters/74029">https://www.intechopen.com/chapters/74029</a> pada 25 Agustus 2021. DOI: 10.5772/intechopen.94489.
- Brandrud, AS., Bretthauer M., Brattebo, G., Pedersen MJ., Hapnes, K., Moller, K., et al. (2017). Local Emergency Medical Response After a Terrorist Attack in Norway: A Qualitative Study. *BMJ Quality & Safety. Oct 1;26(10). p.806-816.* DOI: 10.1136/bmjqs-2017-006517.
- Coppola, D.P. (2015). *Introduction to International Disaster Management*. Retrieved from <a href="https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.royalroads.ca">https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.royalroads.ca</a>.
- Etkin, D. (2014). *Disaster Theory: An Interdisciplinary Approach to Concepts and Causes*. Butterworth-Heinemann.
- Health Standards Organization. (2020). *Emergency and Disaster Management (Guideline)*. Diakses dari <u>www.healthstandards.org</u>. pada 25 Agustus 2021.
- Hill, CW., Jones, GR., Schilling, MA. (2001). *Strategic Management: Theory: An Integrated Approach*. Boston: Houghton-Mifflin.
- https://kaltim.prokal.co/read/news/376697. (2020). Seminggu Penindakan, Jaring 283 Pelanggar Protokol Kesehatan. Prokal.co. Samarinda.

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

- Iptidaiyah, Muhammad, Abdul Kadir, Junaidin dan Ahmad Usman. (2020). Kepatuhan dan Perilaku "Covidiot" Masyarakat pada Protokol Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima). *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 7(2), 256-266. Diakses dari <a href="http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/278/pdf">http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/278/pdf</a> pada 25 Agustus 2021.
- Kartono, J.P. (2021, August 18). Update Covid-19 Kaltim, jumlah kasus turun di bawah seribu kasus. *Kaltim Tribunnews*. Retrieved from <a href="https://kaltim.tribunnews.com/2021/08/18/update-covid-19-kaltim-rabu-18-agustus-2021-jumlah-pasien-turun-di-bawah-seribu-kasus">https://kaltim.tribunnews.com/2021/08/18/update-covid-19-kaltim-rabu-18-agustus-2021-jumlah-pasien-turun-di-bawah-seribu-kasus</a>.
- Kollek, D. (Ed). (2013). Disaster Preparedness for Health Care Facilities. PMPH-USA.
- Kusumasari, Bevaola. (2008). *Resource Capability of Local Government in Managing a Disaster: Evidance from Indonesia*. Department of Management. Faculty of Business and Economic. Monash University. Australia. Diakses dari <a href="https://research.monash.edu/en/publications">https://research.monash.edu/en/publications</a> pada 2 Agustus 2021.
- Kusumasari, B. & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazard*, 60(2), 761-779.
- McCann, DCG. (2013). Introduction to Disasters and Disaster Planning. In Kollek, D. (eds). Disaster Preparedness for Health Care Facilities. PMPH-USA.
- Moe, T. L., & Pathranarakul, P. (2006). An Integrated Approach to Natural Disaster Management: Public Project Management and Its Critical Success Factors. *Disaster Prevention and Management*, 15(3), 396-413.
- Murphy, BL. and Etkin, D. (2011). Introduction. In Etkin, D and Murphy BL (eds). Disaster and Emergency Management in Canada. *Canadian Risk and Hazards Network.*P.1-16. Retrieved from <a href="https://www.crhnet.ca/sites/default/files/library/Introduction%20Formatted.">https://www.crhnet.ca/sites/default/files/library/Introduction%20Formatted.</a>
  pdf.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda. (2021). *Tren Kasus Covid-19 Menurun, Pemkot Samarinda Pertimbangkan Beri Kelonggaran Secara Bertahap.* Retrieved from <a href="https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kesehatan/tren-kasus-covid-19-menurun-pemkot-samarinda-pertimbangkan-beri-kelonggaran-secara-bertahap">https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kesehatan/tren-kasus-covid-19-menurun-pemkot-samarinda-pertimbangkan-beri-kelonggaran-secara-bertahap</a>.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020.
- Potutan, Gerald and Masaru Arakida. (2021). Evolving Disaster Response Practices during Covid-19 Pandemic. *International Journal of Environmetal Research and Public Health, March,* 18(6): 3137. Retrieved from

Volume 2, Nomor 2, November 2021, halaman 115-130 Apriani, dkk: Mensukseskan Mitigasi Bencana Covid-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8002954 pada 26 Agustus 2021. DOI: 10.3390/ijerph18063137.

Riduan, Muhammad. (2020). *Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan di Samarinda, Pemkot Berlakukan Sanksi Mulai Senin 5 Oktober*. Kompas.com. Diakses dari <a href="https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/03">https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/03</a> pada 14 Oktober 2020.

Schade, J. & Schlag, B. (2001). *Acceptability of Urban Transport Pricing*. Helsinki: Government Institute for Economic Research.

Timbie, JW., Ringel, JS., Fox, DS., Pillemer, F., Waxman, DA., Moore, M. et al. (2013). Systematic Review of Strategies to Manage and Allocate Scarce Resources During Mass Casualty Events. *Annals of Emergency Medicine*. *Jun 1;61(6)*. p. 677-689. DOI: 10.1016/j.annermergmed.2013.02.005.

## **PROFIL PENULIS**



Fajar Apriani, merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2005. Lahir di Samarinda pada 14 April 1983. Menyelesaikan pendidikan jenjang Doktoral bidang Administrasi Publik pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin.



Arbainah Saidi, merupakan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda sejak tahun 2002. Lahir di Samarinda pada 30 Agustus 1976. Menyelesaikan pendidikan jenjang Magister bidang Administrasi Publik pada tahun 2010 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## Ady Darmawan dan Ramadhan Aunur Rahman,

mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2020.